



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKj-IP)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR	1
 BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	3
1.2. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Struktur Organisasi	8
1.5. Sumber Daya Manusia.....	10
1.6. Sarana dan Prasarana.....	13
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	16
1. Visi dan Misi.....	16
2. Tujuan dan Sasaran	17
3. Strategi dan Kebijakan.....	17
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	19
2.3. Perjanjian Kinerja	20
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	22
3.2. Realisasi Anggaran.....	28
 BAB IV	
PENUTUP	31
 LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Bapenda) bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bapenda berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2019 dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bapenda telah berupaya melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau . Bapenda, sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan secara umum telah tercapai 108,66 % (dengan predikat sangat tinggi) dari target sebesar 100%.

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Bapenda terus berusaha melaksanakan fungsi dan ketugasan dengan sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan ketugasan pengelolaan pendapatan daerah. Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami sajikan dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk

penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sesuai dengan Motto Bapenda adalah : Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang semakin mapan guna mendukung pembangunan disegala bidang. Berarti Pendapatan tidak hanya sebatas pajak dan retribusi (PAD) , tetapi juga Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Umpan balik (feed back) atas segala yang kami sajikan dan saran – saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Bapenda kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah unsur pelaksana pemerintahan kabupaten yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah, memerlukan suatu sistem penyelenggaraan yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

1.2. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai unit pengelola pendapatan daerah.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil

tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mengaktualisasikan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Berau secara komprehensif sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah
2. Peningkatan dan pengembangan tata kelola pendapatan daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas, kinerja dan kuantitas SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana

Sesuai dengan Tupoksinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan pendapatan daerah maka kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan

(baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Bapenda serta *law enforcement*. Kedua, penggalan potensi pajak. Penggalan potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Tugas Bapenda adalah melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak. Administrasi pajak (*tax administration*) dan hukum pajak (*tax law*) merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem pajak (*tax system*).

Oleh karena itu, administrasi pajak yang baik harus mampu menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. Secara teoritis administrasi pajak merupakan operasionalisasi hukum pajak. Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu – rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat melakukan penggalan pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministrasikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakuan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam *law enforcement*.

Efektifitas pemungutan pajak merupakan *output* dan *outcome* dari kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak - hak Wajib Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak;
2. Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak;

4. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan di bidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
4. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
5. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau . Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

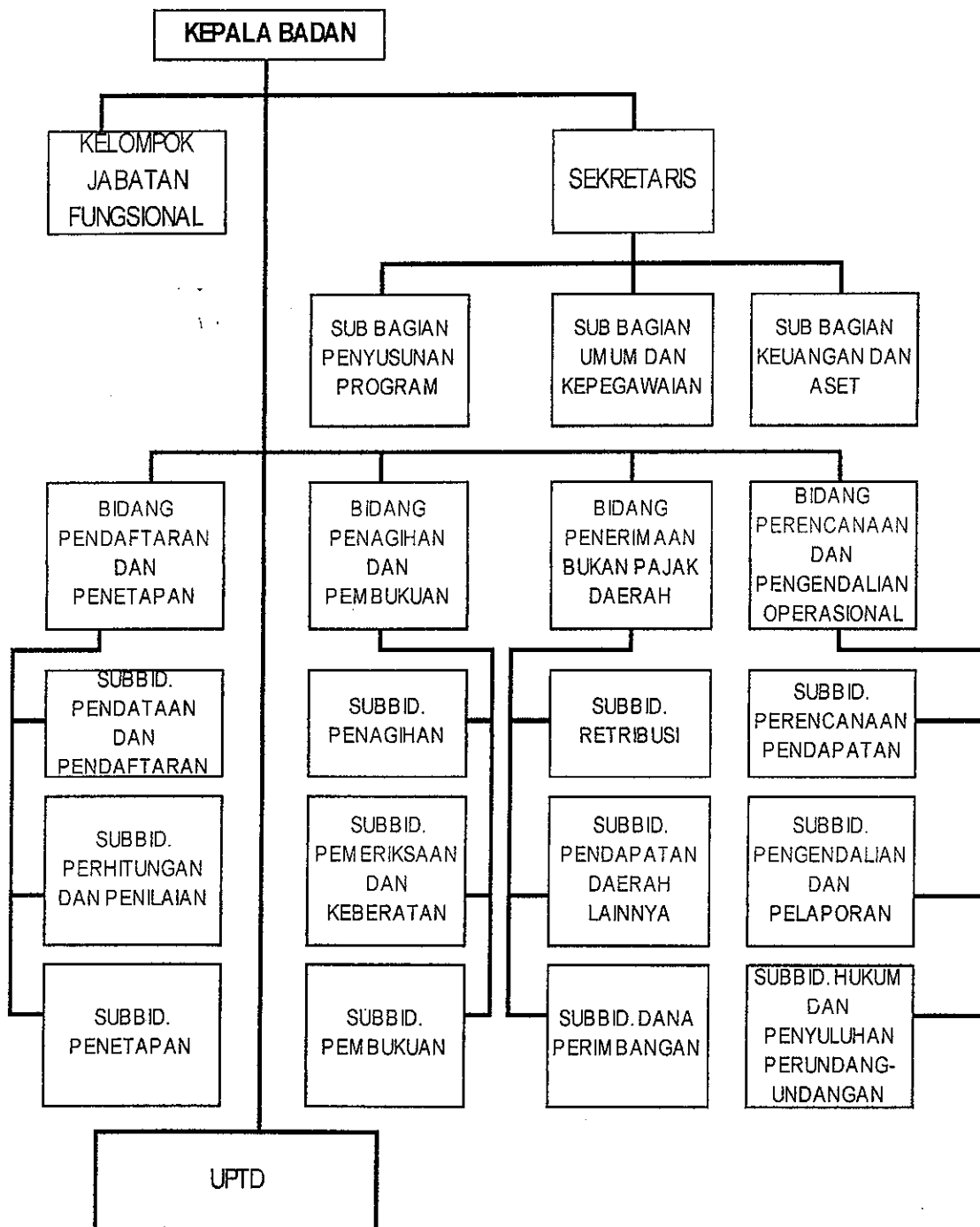
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau , terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan , terdiri dari :
 - a) Subbid Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Subbid Perhitungan dan Penilaian
 - c) Subbid Penetapan
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
 - a) Subbid Penagihan
 - b) Subbid Pemeriksaan dan Keberatan
 - c) Subbid Pembukuan
5. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah , terdiri dari :
 - a) Subbid Retribusi
 - b) Subbid Pendapatan Daerah lainnya
 - c) Subbid Dana Perimbangan
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - a) Subbid Perencanaan Pendapatan

- b) Subbid Pengendalian dan Pelaporan
- c) Subbid Hukum dan Penyuluhan Perundang-undangan

Secara garis besar, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU**



1.5. Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada akhir bulan Desember tahun 2019 sebanyak 65 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 46 orang dan tenaga kontrak sebanyak 19 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau .

NO.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	46	71
2.	Tenaga Kontrak	19	29
	JUMLAH	65	100

1) Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Sementara itu sampai dengan saat ini untuk kelompok jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau masih belum terisi. Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf .

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Eselon II-b	1	1,53
2.	Eselon III-a	1	1,53
3.	Eselon III-b	4	6,16
4.	Eselon IV	15	23,08
5.	Staf	25	38,47
6.	Tenaga Kontrak	19	29,23
	JUMLAH	64	100

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 46 jumlah pegawai yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, terdapat 5 orang (10,87%) pegawai Golongan IV, 27 orang (58,70%) pegawai golongan III, 13 orang (28,26%) pegawai golongan II dan 2 orang (2,17%) pegawai golongan I dari jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan III, yaitu sebesar 58,70%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Golongan .

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	IV	5	10,87
2.	III	27	58,70
3.	II	13	28,26
4.	I	1	2,17
	JUMLAH	46	100

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PENDAFTARAN & PENETAPAN		BIDANG PENAGIHAN & PEMBUKUAN		BIDANG PENERIMAAN BUKAN PAJAK DAERAH		BIDANG P20		JUMLAH		TOTAL
	IPK	P	IPK	P	IPK	P	IPK	P	IPK	P	IPK	P	
I/a													
I/b													
I/c							1				1		1
I/d													
II/a													
II/b													
II/c	2		3	1	1		1				7	1	8

II/d		1	2						1		3	1	4
III/a	1								1	1	2	1	3
III/b	1	4					1	1			2	5	7
III/c		2					1				1	2	3
III/d		1	3		2	1	1	2	1	1	7	5	12
IV/a	1		1			1			1	1	3	2	5
IV/b	1										1		1
IV/c		1										1	1
IV/d													
IV/e			1		1						2		2
Tenaga Kontrak	2	1	7	3	1	1	1	1			11	6	17
JUMLAH	8	10	17	4	5	3	6	4	4	3	40	24	64
TOTAL		18	21		8		10		7		64		

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 43,47%, sedangkan untuk pegawai Strata-2 sebesar 17,39%, Sarjana Muda/DIII sebesar 2,18%, SLTA sebesar 34,78%, dan SLTP sebesar 2,18%. Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan Strata-1 yaitu sebesar 43,78%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan Strata-1. Selengkapanya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	8	17,39
2.	Strata-1 (S1)	20	43,47
3.	Sarjana Muda / DIII	1	2,18
4.	SLTA/SMK	16	34,78
5.	SLTP	1	2,18
6.	SD	-	-
	JUMLAH	46	100

1.6. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping sumber daya manusia yang profesional. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Desember 2019) belum memiliki gedung sendiri yang cukup *representatif* untuk pelaksanaan tugas, demikian halnya juga dengan sarana dan prasarana kantor. Pada saat ini, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berlokasi di Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.6. berikut :

Tabel 1.6. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda 4	6	B			
2.	Kendaraan Roda 2	30	B			
3.	UPS	18	B			
4.	CPU	4	B			
5.	Kursi	85	B			
6.	Kursi	3			RB	
7.	Kursi Komputer	1	B			
8.	Meja Kayu	6	B			
9.	Printer	15			RB	
10.	Printer	27	B			
11.	Mesin Ketik	4	B			
12.	Meja Komputer	14	B			
13.	PC. Unit	3			RB	
14.	PC. Unit	42	B			
15.	Meja ½ Biro	2			RB	
16.	Meja ½ Biro	2	B			
17.	Meja	71	B			
18.	Filling Besi	9	B			
19.	Televisi	1	B			
20.	Televisi	7	B			
21.	Rak Koran	1	B			
22.	Stavolt	3			RB	

23.	UPS	1			RB	
24.	PC. Unit	1			RB	
25.	AC	4			RB	
26.	AC Unit	9	B			
27.	Lemari Dispenser	6	B			
28.	Lemari Arsip	5	B			
29.	Mesin Foto Copy	1			RB	
30.	Mesin Foto Copy	1	B			
31.	Lemari Kulkas	2	B			
32.	Lemari	13	B			
33.	Lemari Es	2	B			
34.	Meja TV	2	B			
35.	Camera Digital	2	B			
36.	Mesin Perforasi	1	B			
37.	Mesin Perforasi Manual	1	B			
38.	Mesin Perforasi	1			RB	
39.	Speaker Simda	1	B			
40.	Speaker	2		KB		
41.	Speaker Simda	1	B			
42.	Note Book	6	B			
43.	Lemari Kayu	6	B			
44.	Jam Dinding	3	B			
45.	Printer Flotter	1	B			
46.	Dispenser	1	B			
47.	Layar Monitor	2	B			
48.	Dispenser	2	B			
49.	Server IBM	1			RB	
50.	Server	2	B			
51.	Router	1	B			
52.	Meja Tamu	1	B			
53.	Papan Tulis	1	B			
54.	Proyektor/Infocus	1	B			
55.	GPS	1	B			
56.	Mesin Porforasi	1	B			
57.	Laptop	2	B			
58.	Mesin Genset	1	B			
59.	Sofa dan Aksesoris Pelayanan	2	B			
60.	Tenda	1	B			
61.	Komputer PC/PC Unit	6	B			
62.	Printer	11	B			
63.	Scanner	1	B			
64.	TOA	1	B			
65.	Kursi Lipat	15	B			
66.	Televisi	1	B			
67.	CCTV	1	B			

68.	Mainboard(Mesin P7210) Cartridge Ribbon Printer	1	B			
69.	Papan Nama Instansi Gedung Terpadu	1	B			
70.	Perangkat Lunak Retribusi Pemakaian Kekayaan	1	B			

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Di dalam Rencana Stratejik setidaknya mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 ini berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Pendapatan Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 adalah :

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Mapan Guna Mendukung Pembangunan di Segala Bidang”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi Badan Pendapatan Pengelolaan Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah;

2. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang baik dan benar;;
3. Meningkatkan mutu pelayanan;
4. Meningkatkan kualitas SDM;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dengan mempertimbangkan isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan daerah ;
2. Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016 - 2021) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada :

1. Peningkatan pendapatan daerah ;
2. Peningkatan tata kelola pendapatan daerah Peningkatan kualitas kelembagaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Berkenaan dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Pertama, yaitu “Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah”, Kebijakannya adalah :

1. Pendataan potensi wajib pajak daerah;
2. Pendataan potensi wajib retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
4. Intensifikasi retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
5. Peningkatan sistem pengawasan intern di bidang pendapatan daerah;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kedua, yaitu “Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah”, Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT;
2. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kepada wajib pajak;
3. Peningkatan Jumlah UPTD Bapenda;
4. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Ketiga, yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”, Kebijakannya adalah :

1. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima;
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
4. Peningkatkan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Keempat, yaitu “Peningkatan dan Pengembangan Kualitas, Kinerja dan Kuantitas SDM”, Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. Pemenuhan kuantitas sumber daya manusia di setiap unit kerja;
3. Peningkatan pemberdayaan SDM secara optimal;
4. Penataan kelembagaan organisasi;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kelima, yaitu “Peningkatan Sarana dan Prasarana”, Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan;

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sebelum Review renstra	Target setelah Review renstra
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2.226 WP/WR 38,90 M 30 WP/WR 13 Kecamatan 5 raperda/ raperbup	2.226 WP/WR 38,90 M 30 WP/WR 13 Kecamatan 5 raperda/ raperbup

		Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	717,28 M	717,28 M
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2 Sistem	2 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	46 Orang	46 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit	32 Unit

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	215,211 M
		Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	1,852 T
		Prosentase penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	726,725 M
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	6 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 dengan realisasinya. Dari 3 jenis sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah
 - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - Sumbangan pihak ketiga
 - Pendapatan hibah

Adapun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah Tercapainya penerimaan daerah secara optimal, maka dalam Tahun Anggaran 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah mengkoordinasikan penerimaan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp 215.211.192.729,00 dan dapat direalisasi sebesar 231.313.492.052,88 atau 107,48%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2019

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	215,211,192,729.00	231,313,492,052.88	107.48%
Dana Perimbangan	1,852,931,880,897.76	2,017,537,589,443.00	108.88%
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	726,725,821,036.60	670,834,600,659.46	92.31%

Data yang sama pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2018

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	201,957,373,976.63	210,492,657,329.57	104.23%
Dana Perimbangan	1,499,529,893,825.50	1,682,458,853,256.00	112.20%
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	429,459,108,000.00	426,284,590,280.80	99.26%

Dari 11 (sebelas) jenis pajak yang ditargetkan sebesar Rp 65,000,000,000.00 dapat direalisasikan sebesar Rp 74,856,934,788.45 (115,16%). Jenis-jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian 11 (Sebelas) Jenis Pajak Tahun Anggaran 2019

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	7,000,000,000.00	5,477,285,336.00	78.25%
Pajak Restoran	25,000,000,000.00	33,660,540,777.00	134.64%
Pajak Hiburan	500,000,000.00	329,876,114.00	65.98%
Pajak Reklame	350,000,000.00	464,407,462.00	132.69%
Pajak Penerangan Jalan	19,000,000,000.00	21,346,448,289.00	112.35%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	568,000,000.00	63,209,295.00	11.13%
Pajak Parkir	7.000.000,00	210,576,000.00	3008.23%
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	11,512,968.00	57.80%
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	869,901,825.00	57.99%
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	4,000,000,000.00	4,755,215,325.00	118.88%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7,000,000,000.00	7,667,961,397.45	109.54%

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan kegiatan yang dilakukan yaitu penggalan potensi pajak melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak pada setiap sumber-sumber pajak daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat terus di tingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan, penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PAJAK	KETERANGAN
1	2	3
1	Pajak Hotel	Terjadinya penurunan penerimaan pajak hotel dari target yang ditetapkan dikarenakan beberapa objek pajak hotel ada yang tutup maupun terjadinya diakibatkan dari penurunan omzet beberapa hotel
2	Pajak Restoran	Penerimaan dari pajak restoran terjadi kenaikan yang signifikan disebabkan oleh beberapa faktor : 1. Bertambahnya jumlah objek pajak khususnya dari penyediaan jasa catering yang merupakan bagian dari pajak restoran 2. Beroperasinya PT.Fast Food Indonesia, Tbk (Kentucky Fried Chicken) 3. Penerimaan lumpsum payment dari PT.Berau Coal yang dialokasikan untuk pajak yang menjadi kewajiban PT.Berau Coal 4. Melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.
3	Pajak Hiburan	Pada tahun 2019 untuk pajak hiburan terjadi penurunan penerimaan dari target yang ditetapkan dikarenakan : Adanya objek pajak hiburan yang tutup atau tidak tidak beroperasi lagi. Pada tahun 2019 objek pajak insidentil berkurang.
4	Pajak Reklame	Pajak reklame pada tahun 2019 terjadi kenaikan penerimaan dari target yang ditetapkan disebabkan oleh: 1. Bertambahnya jumlah objek pajak reklame baik yang insidentil maupun iklan rokok. 2. Penerimaan lumpsum payment dari PT.Berau Coal yang dialokasikan untuk pajak yang menjadi kewajiban PT.Berau Coal
5	Pajak Penerangan Jalan	Kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 dikarenakan ada penerimaan lumpsum payment dari PT.Berau Coal yang berpengaruh pada penerimaan pajak penerangan jalan.
6	Pajak Parkir	Pajak parkir pada tahun 2019 ditargetkan hanya sebesar Rp. 7.000.000 hal ini melihat dari potensi pajak parkir yang hanya berharap pada kegiatan yang bersifat insidentil, akan tetapi pada pertengahan tahun 2019 ada penerimaan parkir dari pengelola Bandara Kalimantan.

7	Pajak Air Bawah Tanah	Penurunan penerimaan pajak air bawah tanah dikarenakan beberapa objek pajak yang tutup sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan.
8	Pajak Sarang Burung Walet	Menurunnya penerimaan pajak sarang burung walet dikarenakan : 1. Objek pajak sarang burung walet alami (goa) mengalami penurunan hasil panen yang disebabkan oleh factor alam dan lain-lain. 2. Sementara untuk objek pajak sarang burung rumahan belum dipungut secara maksimal hanya pada pengusaha sarang burung alami (goa alam) 3. Tahun 2020 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat ada ijin atau tidak ada ijin sepanjang objek dan subjek pajak terpenuhi akan dilakukan pemungutan.
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penurunan penerimaan pajak mineal bukan logam dan batuan disebabkan : 1. perubahan regulasi terkait dengan perijinan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga apabila dipungut dianggap melegalkan usaha pertambangan rakyat. 2. Tahun 2020 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat ijin apabila dua unsur subjek dan objek pajak terpenuhi akan dijadikan potensi untuk dilakukan pemungutan
10	PBB-P2	Penerimaan PBB-P2 terjadi pelampauan dari target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2019 ada penerimaan dari PT.Berau Coal terhadap pembayaran Lumpsum payment
11	BPHTB	Objek Pajak BPHTB adalah objek pajak insidentiiil atas transaksi terjadinya peralihan hak yang bisa disebabkan karena jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya, terjadinya kenaikan penerimaan BPHTB dari target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2019 ada perusahaan perkebunan yang melakukan Peralihan Hak Guna Usaha untuk perkebunan.

Tugas Bapenda adalah melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak. Administrasi pajak (*tax administration*) dan hukum pajak (*tax law*) merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem pajak (*tax system*).

Dari 16 (enam belas) jenis retribusi yang ditargetkan sebesar Rp.12,315,490,450.00 dapat direalisasikan sebesar Rp.10,919,146,668.76, (88.66%). Pencapaian dari beberapa jenis retribusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Pencapaian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,500,000,000.00	2,194,040,500.00	146.27%
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	670,000,000.00	853,026,000.00	127.32%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	658,500,000.00	208,454,000.00	31.66%
Retribusi Pelayanan Pasar	2,607,112,700.00	1,611,101,225.00	61.80%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	292,080,000.00	338,535,000.00	115.90%
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	4,054,783,750.00	3,607,091,050.00	88.96%
Retribusi Pelayanan Penyediaan Penyedotan Kakus -	15,000,000.00	6,400,000.00	42.67%
Retribusi Tempat Pelelangan	36,240,000.00	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5,500,000.00	1,008,000.00	18.33%
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	229,000,000.00	238,089,500.00	103.97%
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan	342,534,000.00	264,343,970.00	77.17%
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	160,000,000.00	132,035,000.00	82.52%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1,336,616,123.76	89.11%
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	24.000.000,00	5,400,000.00	22.50%
Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	220,740,000.00	123,006,300.00	55.72%

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

Tabel 3.5. Pencapaian Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2019

Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari	259,626,000.00	276,934,479.00	106.67%
PLTU (PT. Indo Pusaka Berau)	2,500,000,000.00	0,00-	-
Bankaltim (Deviden)	21,534,817,000.00	21,534,817,410.28	100.00%
PDAM Tirta Segah	2,183,102,000.00	2,176,647,991.00	99.70%

Dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

Tabel 3.6. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Tahun Anggaran 2019

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	633,836,475.70	63.38%
Penerimaan Jasa Giro	5,845,612,000.00	8,837,467,019.35	82.61%
Penerimaan Bunga Deposito	33,193,199,000.00	28,546,158,660.61	86.00%
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35,000,000.00	198,143,196.20	566.12%
Pendapatan Denda	535,000,000.00	811,030,200.71	151.59%
Penerimaan BLUD	64,637,000,000.00	74,848,478,392.01	115.80%
Penerimaan Lain-lain	312,040,000.00	1,800,897,668.81	577.14%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5,860,306,279.00	5,801,969,911.00	99.00%

Dari penerimaan Dana Perimbangan :

Tabel 3.7. Pencapaian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	1,038,555,338,897.76	1,225,153,328,072.00	117.97%
Dana Alokasi Umum	596,930,629,000.00	596,930,629,000.00	100.00%
Dana Alokasi Khusus	217,445,913,000.00	195,453,632,371.00	89.89%

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran
2019

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	571,349,588,036.60	551,351,813,659.46	96.50%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0.00%
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	234,959,000,000.00	234,959,000,000.00	100.00%
Dana Desa dan Desa Adat	109,901,417,000.00	108,830,771,000.00	99.03%

Adapun hasil pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2.226 WP/WR	2.450 WP/WR	110,04
	65 M	74,85 M	115,16
	30 WP/WR	50 WP/WR	166,67
	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
	5 raperda/ raperbup	11 raperda/ raperbup	220
Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	1.038,76 T	1.225,00 T	117,97
Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2 Sistem	2 Sistem	100
Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang	100
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	46 Orang	46 Orang	100
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit	32 Unit	100

3.2. Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran 2019

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000.00	1,139,000.00	56.95
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	395,600,000.00	325,033,770.00	82.16
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	245,000,000.00	216,533,916.00	88.38
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	190,581,000.00	180,464,000.00	94.69
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	142,840,000.00	119,348,400.00	83.55
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30,000,000.00	21,510,174.00	71.70
	Penyediaan alat tulis kantor	200,000,000.00	196,355,625.00	98.18
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450,000,000.00	447,314,000.00	99.40
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11,799,000.00	11,790,000.00	99.92
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350,000,000.00	324,516,000.00	92.72
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000.00	13,374,000.00	44.58
	Penyediaan makanan dan minuman	250,000,000.00	229,248,000.00	91.70
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500,000,000.00	499,154,152.00	99.83
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220,000,000.00	148,700,000.00	67.59
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	96,080,000.00	64,478,740.00	67.11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150,000,000.00	137,827,500.00	91.89
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi perundang-undangan	200,000,000.00	154,327,142.00	77.16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sosialisasi Kinerja program SKPD	60,000,000.00	58,915,000.00	98.19

	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	17,500,000.00	16,308,300.00	93.19
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	470,000,000.00	420,819,456.00	89.54
	Penagihan pajak daerah	513,000,000.00	436,734,190.00	85.13
	Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	499,100,000.00	393,824,650.00	78.91
	Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer	200,000,000.00	191,198,895.00	95.60
	Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	110,000,000.00	108,419,523.00	98.56
	Pendataan dan Pemuktahiran data WP daerah	1,010,000,000.00	870,455,635.00	86.18
	Optimalisasi Retribusi Daerah	180,000,000.00	163,083,989.00	90.60
	Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah	135,000,000.00	131,161,475.00	97.16
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	815,000,000.00	556,675,267.00	68.30

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 108,66 % (dengan predikat sangat tinggi) dari target sebesar 100%. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dan memberikan gambaran dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2019, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau,


Hj. Sri Eka Takariyati, SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN :

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

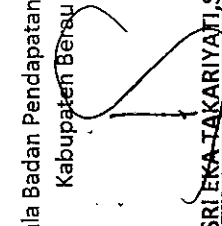
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)	Program / Kegiatan (6)	Target(Rp) (7)	Realisasi(Rp) (8)	% (9)
1 Peningkatan pendapatan daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.226 WP/WR 65 M 30 WP/WR	2.450 WP/WR 74,85 M 50 WP/WR	110.06 115.15 166.67	Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Penagihan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah	470,000,000 513,000,000 499,100,000	420,819,456 436,734,190 393,824,650	89.54 85.13 78.91
		13 Kecamatan 5 raperda/ raperbup	13 Kecamatan 11 raperda/ raperbup	100 220	Pendataan dan Pemutakhiran Data Penyusunan peraturan perundang undangan pendapatan daerah	1,010,000,000 110,000,000	870,455,635 108,419,523	86.18 98.56
2 Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	1.038,76 T	1.225,00 T	117.93	Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer	200,000,000	191,198,895	95.60
3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	3 Sistem 15 Orang	3 Sistem 15 Orang	100 100	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penyediaan Jasa Adminitrasi / Tekhnis Perkantoran	815,000,000 96,080,000	556,675,267 64,478,740	68.30 67.11
4 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat	46 Orang 32 Unit	46 Orang 32 Unit	100 100	Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	200,000,000 245,000,000	154,327,142 216,533,916	77.16 88.38

Jumlah Anggaran BL Tahun 2019 : Rp 7,478,500,000.00
Jumlah Realisasi Anggaran BL Tahun 2019 : Rp 7,166,558,768.50

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

↓
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau


HI. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina Utama Muda

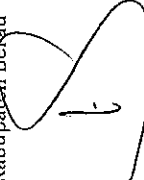
NIP. 19651212 199403 2 008

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sasaran Strategis			Program	Kegiatan (Aktivitas)								Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Peningkatan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah	231.789.420.000,00	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	100%	Penggalan Potensi Pajak Daerah	Jumlah potensi Wajib pajak daerah	Jumlah	2.226 WP	360.985.000		
		Penerimaan dana perimbangan	1.631.706.802.000,00				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah potensi pajak daerah	Rupiah	38,90 M	361.465.000		
		Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	601.146.278.000,00				Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi bermasalah yang dibina	Jumlah	30 WP/WR	300.000.000		
							Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer	Jumlah penerimaan pendapatan transfer	Rupiah	1,40 Triliun	130.000.000		
							Penyusunan peraturan perundang undangan pendapatan daerah	Jumlah peraturan yang ditetapkan	Jumlah	5 raperda/ raperbup	198.348.000		
							Pendataan dan Pemutakhiran Data WP daerah	Jumlah kecamatan yang di data dan dimuktahirkan	Jumlah	13 Kecamatan	663.745.000		
							Optimalisasi Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah	1 Dokumen	106.754.000		
							Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah	2 Dokumen	140.000.000		

2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 sistem	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan	Jumlah	3 sistem	331.652.000
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	9 Orang	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparaturnya yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	100%	Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah	9 orang	120.000.000
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	Jumlah	32 unit	226.000.000

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau



Hi. SRI EKA TAKARYATI, SH, MM
NIP. 19651212 199403 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau
selanjutnya disebut Pihak Pertama

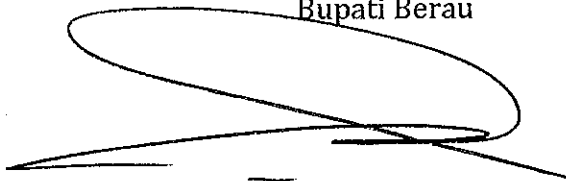
Nama : H. Muharram, S.Pd, MM
Jabatan : Bupati Berau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 14 Januari 2019

Pihak kedua
Bupati Berau



H. Muharram, S.Pd, MM

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau



Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si
NIP. 19680608 199303 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	Rp. 213.228.443.000,00 (100%)
		Prosentase penerimaan dana perimbangan	Rp. 1.822.515.158.000,00 (100%)
		Prosentase penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 614.098.399.000,00 (100%)
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem (100%)
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang (100%)
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan	32 Unit (100%)

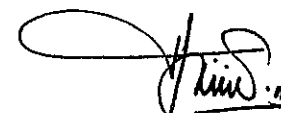
	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2.910.900.000,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	155.000.000,-	
3	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Rp	200.000.000,-	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	45.000.000,-	
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	2.934.100.000,-	
6	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp	755.000.000,-	

Tanjung Redeb, 14 Januari 2019

Bupati Berau

H. Muharram, S.Pd, MM

Kepala Badan



Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si
NIP. 19680608 199303 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Sri Eka Takariyati, SH, MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Muharram, S.Pd, MM

Jabatan : Bupati Berau

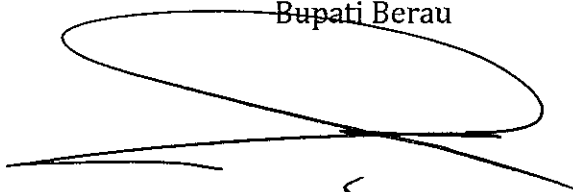
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

Pihak kedua
Bupati Berau



H. Muharram, S.Pd, MM

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau



Hj. Sri Eka Takariyati, SH, MM

NIP. 19651212 199403 2 008

LAMPIRAN
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU

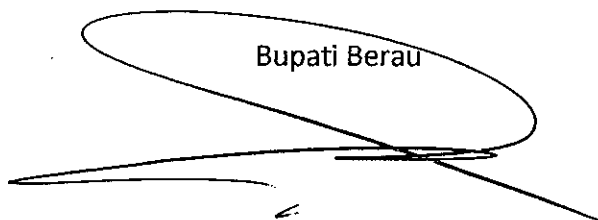
Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
Tahun : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	Rp. 231.789.420.000,00 (100%)
		Prosentase penerimaan dana perimbangan	Rp. 1.631.706.802.000,00 (100%)
		Prosentase penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 601.146.278.000,00 (100%)
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem (100%)
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	9 Orang (100%)
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan	32 Unit (100%)

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2.626.381.400,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	75.000.000,-	
3	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Rp	120.000.000,-	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	45.000.000,-	
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	2.261.297.000,-	
6	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp	331.652.000,-	

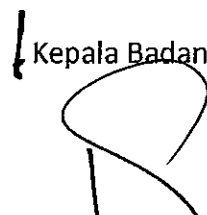
Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

Bupati Berau



H. Muharram, S.Pd, MM

Kepala Badan



Hj. Sri Eka Takariyati, SH, MM
NIP. 19651212 199403 2 008